JURNAL RISET PENDIDIKAN INDONESIA
J R P I

Volume 6, Nomor 3, Oktober 2026, Halaman 1~11, ISSN: 2809-980X

Peran Pendidikan Multikultural dalam Mencegah Intoleransi dan Perundungan di Kalangan Pelajar

Indana Aulia[1*], Septiana Lailatul Hikmah[2], Nurul Mubin[3]
[1..2,3] Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Sains Al-Qur'an

Artikel Info

Riwayat Artikel:

Diterima 16-08-2026
Diperbaiki 05-09-2026
Diterima 30-09-2026

Kata Kunci:

Pendidikan Multikultural
Intolerenasi
Perundungan di Kalangan Pelajar

ABSTRAK

Intolerance and bullying remain serious problems in Indonesian schools, which bring together students from diverse ethnic, religious, linguistic, and socioeconomic backgrounds. Prejudice toward differences often becomes a trigger for bullying, while unaddressed bullying reinforces exclusion and discrimination. This article examines the role of multicultural education in preventing intolerance and bullying among students. Using a library research method, data were collected from books, scholarly articles, and national regulations, and analyzed through data condensation, data display, and conclusion drawing. The findings show that multicultural education contributes to prevention by fostering empathy and understanding, building positive self-identity, training critical thinking toward stereotypes, developing social and conflict-resolution skills, and creating an inclusive school culture. Its implementation is most effective when integrated into the curriculum, teacher role modelling, collaborative learning, extracurricular activities, school policies and reporting mechanisms, partnerships with parents and communities, and digital literacy. Challenges include uneven teacher understanding, administrative workload, the influence of social media, permissive attitudes toward bullying, and unequal resources. Multicultural education should therefore be treated as a sustained, whole-school approach rather than an incidental program.

Ini adalah artikel open access di bawah lisensi CC BY-SA.

Penulis Koresponden:

Indana Aulia
Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Sains Al-Qur'an, Indonesia.
Email: indanaaulia1@unsiq.ac.id

1. INTRODUCTION

Sekolah bukan hanya tempat mempelajari pengetahuan akademik, tetapi juga ruang pertama bagi anak untuk belajar hidup bersama orang lain di luar lingkungan keluarganya. Di kelas, pelajar bertemu dengan teman yang berbeda agama, suku, bahasa daerah, kebiasaan, kondisi ekonomi, bahkan kemampuan fisik dan cara berpikir. Pengalaman bergaul inilah yang membentuk cara pandang mereka terhadap perbedaan. Indonesia dikenal sebagai bangsa yang majemuk dengan ratusan suku bangsa dan bahasa daerah. Keragaman tersebut merupakan

kekayaan bangsa, tetapi dapat menjadi sumber konflik apabila tidak dikelola dengan baik (Tilaar, 2004).

Ruang belajar yang seharusnya aman tidak selalu ramah bagi semua anak. Ejekan berbau SARA, pengucilan teman karena latar belakangnya, hingga kekerasan fisik dan verbal masih terus terjadi di berbagai satuan pendidikan. Perundungan (*bullying*) umumnya dipahami sebagai perilaku agresif yang disengaja, dilakukan berulang, dan melibatkan ketimpangan kekuatan antara pelaku dan korban (Olweus, 1993). Perundungan kini juga berpindah ke ruang digital dalam bentuk *cyberbullying* yang dapat berlangsung tanpa batas waktu dan tempat.

Dampak perundungan tidak ringan. Korban dapat mengalami kecemasan, rendah diri, penurunan motivasi belajar (Candrawati & Setyawan, 2023), hingga gangguan kesehatan mental (Moore et al., 2017). Laporan UNESCO (2019) menunjukkan bahwa perundungan merupakan masalah global yang dialami hampir sepertiga pelajar di dunia dalam sebulan terakhir, dan perundungan siber berkaitan dengan dampak psikososial yang merugikan (Kowalski et al., 2014). Perundungan juga dapat berkaitan dengan identitas kelompok, misalnya perbedaan pengalaman perundungan antarkelompok etnis yang ditemukan di Tiongkok (Ba et al., 2019). Hal ini menunjukkan bahwa persoalan perundungan tidak dapat dilepaskan dari cara kelompok-kelompok di sekolah memandang perbedaan satu sama lain.

Pemerintah telah memperkuat perlindungan peserta didik melalui Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, yang mewajibkan satuan pendidikan membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK). Namun, regulasi saja tidak cukup. Perundungan tidak muncul dalam ruang hampa, melainkan dipengaruhi oleh interaksi individu dengan lingkungan sosial, norma kelompok, dan nilai budaya yang melingkupinya (Bronfenbrenner, 1979; Salmivalli, 2010). Karena itu, pencegahan perlu menyentuh cara pandang peserta didik terhadap perbedaan, dan di sinilah pendidikan multikultural memiliki peran strategis.

Sejumlah penelitian telah menunjukkan potensi pendidikan multikultural dalam pencegahan perundungan. Kajian literatur terhadap sepuluh artikel oleh Ambarwati et al. (2025) menyimpulkan bahwa pendidikan multikultural efektif menurunkan perilaku perundungan di sekolah dasar, sedangkan sosialisasi nilai multikultural pada siswa SMA di Mataram meningkatkan pemahaman siswa tentang perundungan dan multikulturalisme (Wahidah et al., 2024). Di tingkat internasional, meta-analisis menunjukkan bahwa program antiperundungan di sekolah secara umum efektif menurunkan perundungan dan viktimisasi (Ttofi & Farrington, 2011; Gaffney et al., 2021). Meskipun demikian, kajian tentang pendidikan multikultural dan kajian tentang perundungan sering dibahas secara terpisah, dan penjelasan tentang bagaimana intoleransi menjadi jembatan antara keduanya masih terbatas.

Artikel ini berupaya mengisi celah tersebut dengan menempatkan intoleransi sebagai salah satu akar perundungan yang dapat dicegah melalui pendidikan multikultural. Rumusan masalah yang dibahas adalah: (1) bagaimana hubungan antara intoleransi dan perundungan di lingkungan sekolah; (2) apa peran pendidikan multikultural dalam mencegah keduanya; (3) bagaimana strategi penerapannya di sekolah; dan (4) apa tantangan serta indikator keberhasilannya. Tujuan artikel ini adalah menjelaskan konsep pendidikan multikultural, menguraikan hubungan intoleransi dan perundungan, serta merumuskan peran, strategi, dan model penerapan pendidikan multikultural yang dapat dipakai oleh sekolah, guru, dan pembuat kebijakan.

2. METHODS

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang memanfaatkan sumber-sumber tertulis sebagai data utama (Zed, 2004). Metode ini dipilih karena tujuan penelitian adalah menyintesis konsep, temuan, dan kebijakan yang sudah ada untuk merumuskan peran dan strategi pendidikan multikultural dalam pencegahan intoleransi dan perundungan, bukan menguji hipotesis dengan data lapangan.

Sumber data terdiri atas buku teks, artikel jurnal ilmiah, dan dokumen regulasi nasional yang membahas pendidikan multikultural, intoleransi, perundungan, dan iklim sekolah. Literatur yang dirujuk mencakup jurnal nasional dan internasional serta regulasi yang relevan. Pemilihan sumber mengikuti kriteria berikut:

a. Membahas pendidikan multikultural, intoleransi, perundungan, atau iklim sekolah secara langsung;
b. Berasal dari buku, jurnal ilmiah, atau dokumen resmi pemerintah;
c. Untuk artikel jurnal, memiliki identitas yang dapat ditelusuri, seperti DOI atau halaman resmi jurnal;
d. Diutamakan sumber yang menyajikan bukti empiris, tinjauan sistematis, atau kerangka teoretis yang banyak dirujuk.

Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi dengan tahapan: (1) merumuskan fokus kajian dan kata kunci, yaitu pendidikan multikultural, intoleransi, perundungan, dan sekolah inklusif; (2) menelusuri literatur pada laman jurnal dan basis data ilmiah; (3) menyeleksi sumber berdasarkan kriteria di atas; (4) membaca dan mencatat konsep, temuan, serta rekomendasi dari tiap sumber; dan (5) memeriksa kembali identitas sumber, termasuk DOI, sebelum dimasukkan dalam daftar referensi.

Analisis data mengikuti model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2014), yaitu kondensasi data (memilih dan merangkum temuan literatur ke dalam kategori), penyajian data (menyusunnya ke dalam matriks dan uraian tematik), serta penarikan kesimpulan secara induktif dengan mengidentifikasi pola dan hubungan antartema. Tema utama yang dikembangkan adalah: hubungan intoleransi dan perundungan, peran pendidikan multikultural, strategi penerapan, tantangan, dan indikator keberhasilan.

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan pandangan dari beberapa penulis dan jenis sumber (teori, hasil penelitian, tinjauan sistematis, dan regulasi), serta mengutamakan literatur yang dapat ditelusuri secara resmi. Klaim yang hanya didukung satu sumber disajikan secara hati-hati dan tidak digeneralisasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Jalur dari Intoleransi ke Perundungan

Hasil kajian menunjukkan bahwa intoleransi dan perundungan dapat dipahami sebagai rangkaian yang saling menguatkan, bukan dua persoalan terpisah. Berdasarkan sintesis literatur (Olweus, 1993; Salmivalli, 2010; Thornberg, 2015), rangkaian tersebut dapat dipetakan ke dalam beberapa tahap, dan pada setiap tahap terdapat titik intervensi bagi pendidikan multikultural (Tabel 1).

Tabel 1. Jalur dari Prasangka ke Perundungan dan Titik Intervensi

Tahap	Bentuk di Sekolah	Titik Intervensi Pendidikan Multikultural
1. Prasangka dan stereotip	Anggapan negatif terhadap kelompok tertentu yang diterima dari lingkungan atau media	Integrasi konten, literasi media, pembelajaran berpikir kritis
2. Pelabelan dan candaan merendahkan	Julukan berbau SARA, ejekan terhadap logat atau penampilan	Keteladanan guru, norma kelas, penanganan candaan sejak dini
3. Pengucilan	Menolak berkelompok atau berteman dengan teman yang berbeda	Kelompok belajar heterogen, proyek kolaboratif lintas latar belakang
4. Perundungan terbuka	Kekerasan fisik, verbal, relasional, atau siber yang berulang	Kebijakan antiperundungan, TPPK, saluran pelaporan, mediasi
5. Normalisasi	Kekerasan dianggap biasa; saksi diam dan korban enggan melapor	Budaya sekolah inklusif, peran saksi aktif, duta teman sebaya

Sumber: Hasil analisis kepustakaan (2026)

Pemetaan ini menunjukkan bahwa semakin awal intervensi dilakukan, semakin kecil peluang perilaku berkembang menjadi perundungan. Pencegahan yang hanya berfokus pada tahap keempat, yaitu menindak pelaku yang sudah melakukan kekerasan, akan selalu terlambat dibandingkan pencegahan yang bekerja pada tahap prasangka dan pelabelan. Inilah alasan mengapa pendidikan multikultural dipandang sebagai strategi pencegahan primer.

3.2 Peran Pendidikan Multikultural dalam Pencegahan

Hasil kajian menunjukkan bahwa peran pendidikan multikultural dapat dipetakan pada lima dimensi Banks (2015). Matriks hubungan antara dimensi, praksis di sekolah, dan dampak pencegahannya disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Matriks Pendidikan Multikultural dan Pencegahan Perundungan di Sekolah

Dimensi Banks	Bentuk Praksis di Sekolah	Dampak terhadap Pencegahan
Integrasi konten	Contoh, cerita rakyat, dan sudut pandang beragam budaya dalam mata pelajaran (PPKn, Bahasa Indonesia, Sejarah, IPS)	Mengurangi stereotip; menumbuhkan pemahaman dan empati terhadap teman yang berbeda
Konstruksi pengetahuan	Diskusi kritis tentang asal prasangka, studi kasus diskriminasi, literasi media dan hoaks	Siswa mampu menilai informasi dan menolak generalisasi terhadap kelompok tertentu
Pengurangan prasangka	Kelompok belajar heterogen, proyek lintas budaya, kegiatan bersama lintas kelompok	Menurunkan jarak sosial; membuka pertemanan lintas latar belakang

Dimensi Banks	Bentuk Praksis di Sekolah	Dampak terhadap Pencegahan
Pedagogi kesetaraan	Pembelajaran berdiferensiasi, penilaian adil, penanganan candaan yang merendahkan	Semua siswa merasa dihargai; menurunkan pelabelan dan pengucilan
Budaya sekolah yang memberdayakan	Tata tertib antiperundungan, TPPK, saluran pelaporan aman, duta teman sebaya	Norma sekolah menolak kekerasan; saksi berani menolong dan melapor

Sumber: Hasil analisis kepustakaan (2026)

3.2.1 Menumbuhkan Pemahaman dan Empati

Prasangka umumnya tumbuh dari ketidaktahuan dan jarangnya perjumpaan yang bermakna. Melalui pembelajaran yang mengenalkan budaya, tradisi, dan keyakinan yang beragam, pelajar belajar bahwa perbedaan adalah hal yang wajar. Ketika anak mengenal cerita dan pengalaman teman yang berbeda dengannya, empati tumbuh, dan empati menjadi penghambat penting bagi perilaku menyakiti orang lain. Kajian Ambarwati et al. (2025) menyimpulkan bahwa melalui pendidikan multikultural, sikap toleransi dan empati siswa berkembang sehingga mereka lebih mampu menyikapi konflik sosial secara damai.

Temuan Pettigrew dan Tropp (2006) memperkuat hal ini: kontak antarkelompok yang dikelola dengan baik cenderung mengurangi prasangka dan efeknya meluas ke kelompok luar secara umum. Artinya, pengalaman positif bersama beberapa teman dari kelompok berbeda dapat mengubah pandangan siswa terhadap kelompok tersebut secara lebih luas.

3.2.2 Membangun Identitas Diri yang Positif

Pendidikan multikultural tidak meminta siswa meninggalkan identitasnya. Siswa didorong bangga akan budayanya sekaligus menghormati budaya orang lain, sejalan dengan gagasan Banks (2008) tentang keseimbangan identitas kelompok dan kewargaan. Anak yang identitasnya dihargai cenderung lebih percaya diri dan tidak mudah menjadi korban, sedangkan anak yang memahami keragaman tidak merasa perlu merendahkan orang lain untuk merasa unggul.

3.2.3 Melatih Berpikir Kritis terhadap Stereotip dan Prasangka

Stereotip sering diterima begitu saja dari lingkungan atau media. Pembelajaran multikultural melatih pelajar mempertanyakan informasi, membedakan fakta dari opini, dan mengenali bahwa penilaian terhadap seseorang tidak boleh didasarkan pada kelompoknya. Dimensi proses konstruksi pengetahuan dalam kerangka Banks (2015) mendorong siswa memahami bahwa sudut pandang dipengaruhi latar belakang. Kemampuan ini penting pula di ruang digital, tempat ujaran kebencian dan hoaks mudah menyebar.

3.2.4 Membentuk Keterampilan Sosial dan Penyelesaian Konflik

Perbedaan tidak selalu bebas dari gesekan. Pendidikan multikultural membekali pelajar dengan keterampilan berkomunikasi, mendengarkan, bernegosiasi, dan menyelesaikan konflik tanpa kekerasan, sehingga perselisihan antarteman tidak berkembang menjadi perundungan. Keterampilan ini dapat dilatih melalui diskusi dilema moral, bermain peran, dan simulasi mediasi sebaya.

3.2.5 Menciptakan Budaya Sekolah yang Inklusif dan Aman

Sekolah yang menerapkan nilai multikultural secara konsisten menjadikan penghormatan terhadap perbedaan sebagai norma bersama. Dalam budaya seperti ini, perundungan dan ujaran diskriminatif dipandang sebagai pelanggaran nilai sekolah, bukan candaan. Mengingat peran kelompok sebaya dalam perundungan (Salmivalli, 2010), norma yang kuat membuat saksi lebih berani menolong atau melapor. Paluck et al. (2016) menunjukkan bahwa perubahan

norma dapat didorong melalui siswa yang berpengaruh dalam jejaring pertemanan, sehingga siswa bukan hanya sasaran program tetapi juga pelaku perubahan.

3.3 Strategi Penerapan di Sekolah

3.3.1 Melalui Kurikulum dan Pembelajaran

Nilai multikultural tidak harus berdiri sebagai mata pelajaran baru, tetapi dapat diintegrasikan ke berbagai mata pelajaran dan dilengkapi kegiatan sosialisasi, diskusi, dan evaluasi pemahaman siswa (Wahidah et al., 2024). Contoh integrasi dapat dilihat berikut ini:

a. **Pendidikan Pancasila:** membahas makna kebinekaan, hak dan kewajiban warga negara, serta kasus diskriminasi.
b. **Bahasa Indonesia:** membaca dan menulis cerita rakyat dari berbagai daerah, serta menulis teks persuasif tentang toleransi.
c. **Sejarah dan IPS:** mempelajari kontribusi beragam kelompok dalam pembentukan bangsa dan membandingkan sudut pandang dalam suatu peristiwa.
d. **Seni dan Budaya:** mempelajari ragam seni daerah dan menampilkannya secara bersama.
e. **Pendidikan Agama dan Budi Pekerti:** mengangkat nilai kasih sayang, keadilan, dan penghormatan terhadap sesama sebagai landasan etika bergaul.

Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila juga membuka ruang untuk kegiatan lintas budaya, misalnya pameran budaya, kuliner nusantara, atau dokumentasi tradisi lokal. Agar tidak berhenti pada kegiatan seremonial, projek tersebut sebaiknya diakhiri dengan refleksi tentang apa yang dipelajari siswa mengenai perbedaan dan bagaimana mereka akan menerapkannya dalam pergaulan sehari-hari.

3.3.2 Melalui Keteladanan dan Kompetensi Guru

Guru adalah figur yang paling sering ditiru pelajar. Cara guru memperlakukan semua siswa secara adil, menanggapi candaan yang menyinggung, dan menghindari prasangka dalam penilaian memberi pesan yang lebih kuat daripada ceramah. Ambarwati et al. (2025) menekankan bahwa guru perlu menanamkan nilai inti pendidikan multikultural, seperti demokrasi, humanisme, dan pluralisme, di samping menguasai kegiatan pembelajaran. Sekolah perlu membekali guru dengan pelatihan pembelajaran inklusif, pengenalan tanda-tanda perundungan, dan penanganan konflik yang empatik.

Pembiaran candaan yang merendahkan, termasuk oleh guru sendiri, dapat menjadi pesan tersembunyi bahwa perilaku tersebut diterima. Karena itu, kesadaran guru terhadap bahasa dan sikapnya sendiri merupakan bagian penting dari pencegahan.

3.3.3 Melalui Pembelajaran Kolaboratif

Sejalan dengan hipotesis kontak Allport (1954), kerja sama dalam kelompok yang beragam dapat mengurangi prasangka bila setiap anggota berperan penting dan memiliki tujuan bersama. Guru dapat menyusun kelompok heterogen dan merancang tugas yang membutuhkan kontribusi semua anggota sehingga siswa belajar saling bergantung dan menghargai. Meta-analisis Ttofi dan Farrington (2011) juga mengidentifikasi kerja kelompok kooperatif sebagai salah satu komponen program yang berkaitan dengan penurunan perundungan.

Agar kondisi kontak optimal terpenuhi, guru perlu memastikan bahwa setiap anggota kelompok memiliki status yang setara dalam tugas, misalnya dengan membagi peran yang saling melengkapi dan bergiliran memimpin.

3.3.4 Melalui Kegiatan Sekolah dan Ekstrakurikuler

Perayaan hari besar yang saling menghormati, pekan budaya, pertukaran pelajar antardaerah, seni dan olahraga bersama, serta organisasi siswa yang inklusif memberi pengalaman nyata berinteraksi dengan teman yang berbeda. Program teman sebaya, seperti duta anti-perundungan atau pelopor kebinekaan, juga efektif karena pesan lebih mudah diterima dari sesama pelajar. Eksperimen jejaring sosial di 56 sekolah menunjukkan bahwa

melibatkan siswa yang berpengaruh dalam kampanye antikonflik dapat mengubah norma sosial dan mengurangi konflik antarsiswa (Paluck et al., 2016).

3.3.5 Melalui Kebijakan dan Mekanisme Pelaporan

Pendidikan multikultural perlu didukung aturan yang jelas. Sekolah memerlukan tata tertib yang tegas terhadap perundungan dan diskriminasi, TPPK sebagaimana diamanatkan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023, serta saluran pelaporan yang aman, rahasia, dan mudah diakses. Kebijakan antiperundungan yang menyeluruh di tingkat sekolah merupakan salah satu komponen program yang berkaitan dengan penurunan perundungan (Ttofi & Farrington, 2011). Penanganan kasus sebaiknya mengutamakan pemulihan korban dan pembinaan pelaku, bukan semata hukuman, serta melibatkan orang tua dan konselor.

3.3.6 Melalui Kolaborasi dengan Orang Tua dan Masyarakat

Dalam kerangka Bronfenbrenner (1979), hubungan sekolah dan keluarga (mesosistem) sangat menentukan. Nilai yang diajarkan di sekolah akan melemah bila bertentangan dengan pengalaman anak di rumah dan lingkungannya. Ttofi dan Farrington (2011) menemukan bahwa program yang melibatkan pertemuan dengan orang tua cenderung lebih efektif. Sekolah perlu menjalin komunikasi dengan orang tua, melibatkan tokoh masyarakat dan pemuka agama, serta mengajak komunitas berpartisipasi dalam kegiatan kebudayaan.

3.3.7 Melalui Literasi Digital

Karena banyak perundungan dan ujaran kebencian terjadi di dunia maya, pendidikan multikultural perlu dikaitkan dengan literasi digital (Kowalski et al., 2014). Siswa diajarkan etika bermedia sosial, cara mengenali hoaks dan provokasi bernuansa SARA, serta langkah ketika menjadi korban atau saksi perundungan daring, misalnya menyimpan bukti, memblokir akun, dan melapor kepada guru atau orang dewasa yang dipercaya. Kesepakatan etika bermedia sosial di grup kelas dapat disusun bersama siswa agar mereka merasa memiliki aturan tersebut.

3.4 Model Penerapan Tiga Tingkat

Berdasarkan sintesis di atas, strategi penerapan dapat disusun ke dalam model tiga tingkat yang sejalan dengan kerangka ekologi (Bronfenbrenner, 1979; Swearer & Hymel, 2015), seperti ditunjukkan pada Tabel 3.

Tabel 3. Model Penerapan Pendidikan Multikultural Tiga Tingkat

Tingkat	Fokus Kegiatan	Contoh Program
Kelas	Pembelajaran, relasi guru dan siswa, relasi antarsiswa	Kelompok belajar heterogen, diskusi studi kasus, refleksi mingguan, kesepakatan kelas
Sekolah	Kebijakan, budaya, dan lingkungan fisik	TPPK, tata tertib antiperundungan, duta teman sebaya, pekan budaya, penataan area rawan seperti kantin dan lorong
Komunitas	Keluarga, masyarakat, dan ruang digital	Pertemuan orang tua, pelibatan tokoh masyarakat, literasi digital keluarga, kegiatan budaya bersama

Sumber: Hasil analisis kepustakaan (2026)

Model ini menekankan keterpaduan: program kelas tanpa dukungan kebijakan sekolah mudah melemah, sedangkan kebijakan tanpa perubahan cara berinteraksi di kelas cenderung berhenti pada aturan di atas kertas.

3.5 Indikator Evaluasi Keberhasilan

Keberhasilan pencegahan tidak cukup diukur dari sedikitnya kasus yang dilaporkan, karena rendahnya laporan dapat berarti korban takut atau tidak percaya pada mekanisme pelaporan. Sekolah perlu menggunakan indikator yang lebih beragam, misalnya:

a. rasa aman siswa di berbagai area sekolah, termasuk kantin, lorong, dan ruang digital, melalui survei berkala;
b. keterbukaan siswa untuk melapor dan berkonsultasi dengan guru atau konselor;
c. kualitas relasi pertemanan lintas kelompok, misalnya komposisi kelompok bermain dan kelompok belajar;
d. tanggapan saksi terhadap perilaku merendahkan, yaitu apakah mereka menolong, melapor, atau diam;
e. pemulihan korban dan perubahan perilaku pelaku setelah mediasi;
f. sikap guru dalam menanggapi candaan yang menyinggung, melalui supervisi dan refleksi.

Tinjauan sistematis tentang program antiperundungan menegaskan pentingnya evaluasi yang terukur sebelum dan sesudah program (Ttofi & Farrington, 2011). Sekolah dapat memulai dengan survei sederhana di awal tahun ajaran sebagai data dasar, lalu mengulangnya pada akhir semester untuk melihat perubahan.

3.6 Tantangan dan Alternatif Solusi

Penerapan pendidikan multikultural tidak lepas dari berbagai hambatan. Tabel 4.4 merangkum tantangan utama beserta alternatif solusinya.

Tabel 4. Tantangan Penerapan dan Alternatif Solusi

Tantangan	Uraian	Alternatif Solusi
Pemahaman guru belum merata	Sebagian guru menganggap nilai multikultural sebagai tambahan, bukan bagian dari pembelajaran sehari-hari	Pelatihan berkelanjutan, komunitas belajar guru, contoh perangkat ajar terintegrasi
Beban administrasi dan waktu	Guru sulit merancang kegiatan bermakna karena tugas administratif	Mengintegrasikan nilai pada modul ajar yang sudah ada, bukan menambah program terpisah
Pengaruh lingkungan dan media sosial	Narasi kebencian dan stereotip dari luar sekolah melemahkan pesan di kelas	Literasi digital, kolaborasi dengan orang tua, kesepakatan etika bermedia sosial
Sikap permisif terhadap perundungan	Perundungan dianggap candaan atau proses tumbuh dewasa, sehingga kasus tidak dilaporkan	Sosialisasi TPPK, norma kelas yang tegas, saluran pelaporan aman
Kesenjangan sumber daya	Tidak semua sekolah memiliki konselor, bahan ajar, dan pelatihan yang memadai	Dukungan dinas pendidikan, berbagi praktik baik antarsekolah, pemanfaatan sumber belajar terbuka

Sumber: Hasil analisis kepustakaan (2026)

Tantangan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan multikultural memerlukan komitmen jangka panjang dan dukungan bersama dari sekolah, pemerintah, keluarga, dan masyarakat. Selain itu, perlu dicatat bahwa kontak antarkelompok tidak otomatis mengurangi

prasangka bila dilakukan secara asal; kondisi seperti status setara dan tujuan bersama membuat dampaknya lebih besar (Pettigrew & Tropp, 2006). Karena itu, kualitas rancangan kegiatan sama pentingnya dengan jumlah kegiatan.

4. CONCLUSION

Intoleransi dan perundungan di kalangan pelajar merupakan persoalan yang saling berkaitan dan berdampak pada keselamatan, kesehatan mental, prestasi belajar, dan masa depan bangsa. Kajian ini menyimpulkan bahwa pendidikan multikultural berperan mencegah keduanya dengan menyentuh akar masalah: menumbuhkan empati dan pemahaman, membangun identitas diri yang positif, melatih berpikir kritis terhadap stereotip, membekali keterampilan menyelesaikan konflik, dan membentuk budaya sekolah yang inklusif.

Peran tersebut akan efektif apabila dijalankan sebagai pendekatan seluruh sekolah pada tiga tingkat, yaitu kelas, sekolah, dan komunitas. Strategi yang dapat ditempuh meliputi integrasi nilai ke dalam kurikulum, keteladanan guru, pembelajaran kolaboratif, kegiatan ekstrakurikuler dan program teman sebaya, kebijakan serta mekanisme pelaporan yang aman, kerja sama dengan orang tua dan masyarakat, serta literasi digital. Keberhasilan perlu dinilai melalui indikator iklim sekolah, bukan hanya jumlah kasus yang dilaporkan.

Berdasarkan simpulan tersebut, disarankan agar:

a. Sekolah menjadikan nilai kebinekaan dan antiperundungan sebagai bagian dari visi, tata tertib, dan kegiatan rutin, bukan program sesaat.
b. Pemerintah dan dinas pendidikan menyediakan pelatihan berkelanjutan bagi guru dan tenaga kependidikan tentang pembelajaran inklusif dan penanganan perundungan.
c. Guru mengintegrasikan perspektif multikultural dalam setiap mata pelajaran dan menggunakan metode pembelajaran kolaboratif yang memenuhi prinsip kesetaraan status.
d. Sekolah memperkuat TPPK, layanan konseling, dan sistem pelaporan yang aman serta ramah korban, disertai survei iklim sekolah secara berkala.
e. Orang tua dan masyarakat dilibatkan secara aktif, termasuk dalam pendampingan penggunaan media digital.
f. Peserta didik diberi ruang berpartisipasi sebagai agen perubahan melalui program teman sebaya dan kegiatan kreatif lintas budaya.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena bersifat kajian kepustakaan sehingga belum menyajikan data lapangan, dan sebagian bukti yang dirujuk berasal dari konteks di luar Indonesia. Penelitian selanjutnya disarankan menguji efektivitas strategi ini melalui studi kasus, penelitian tindakan, atau desain kuasi-eksperimen pada berbagai jenjang dan konteks budaya sekolah di Indonesia.

REFERENCES

Allport, G. W. (1954). *The nature of prejudice*. Addison-Wesley.

Ambarwati, A., Ash-Shiddiqy, A. R., Dewi, A. S., Astuti, E. N., & Ardiyanti, S. (2025). Analisis dampak pendidikan multikultural dalam mencegah perilaku bullying di sekolah dasar. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar, 10*(1), 1340–1350. https://doi.org/10.23969/jp.v10i01.22417

Ba, Z., Han, Z., Gong, Z., Li, F., Zhang, H., & Zhang, G. (2019). Ethnic differences in experiences of school bullying in China. *Children and Youth Services Review, 104*, 104402. https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2019.104402

Banks, J. A. (2008). Diversity, group identity, and citizenship education in a global age. *Educational Researcher, 37*(3), 129–139. https://doi.org/10.3102/0013189X08317501

Banks, J. A. (2015). *Cultural diversity and education: Foundations, curriculum, and teaching* (6th ed.). Routledge.

Bronfenbrenner, U. (1979). *The ecology of human development: Experiments by nature and design*. Harvard University Press.

Candrawati, R., & Setyawan, A. (2023). Analisis perilaku bullying terhadap motivasi belajar siswa sekolah dasar. *PANDU: Jurnal Pendidikan Anak dan Pendidikan Umum, 1*(2), 64–68. https://doi.org/10.59966/pandu.v1i2.127

Endayani, H. (2024). Peran pendidikan multikultural dalam mencegah perilaku bullying dikalangan siswa sekolah. *Ijtimaiyah: Jurnal Ilmu Sosial dan Budaya, 8*(1). https://doi.org/10.30821/ijtimaiyah.v8i1.21099

Gaffney, H., Ttofi, M. M., & Farrington, D. P. (2021). Effectiveness of school-based programs to reduce bullying perpetration and victimization: An updated systematic review and meta-analysis. *Campbell Systematic Reviews, 17*(2), e1143. https://doi.org/10.1002/cl2.1143

Gay, G. (2010). *Culturally responsive teaching: Theory, research, and practice* (2nd ed.). Teachers College Press.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2023). *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan*. Jakarta.

Kowalski, R. M., Giumetti, G. W., Schroeder, A. N., & Lattanner, M. R. (2014). Bullying in the digital age: A critical review and meta-analysis of cyberbullying research among youth. *Psychological Bulletin, 140*(4), 1073–1137. https://doi.org/10.1037/a0035618

Ladson-Billings, G. (1995). Toward a theory of culturally relevant pedagogy. *American Educational Research Journal, 32*(3), 465–491. https://doi.org/10.3102/00028312032003465

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.

Moore, S. E., Norman, R. E., Suetani, S., Thomas, H. J., Sly, P. D., & Scott, J. G. (2017). Consequences of bullying victimization in childhood and adolescence: A systematic review and meta-analysis. *World Journal of Psychiatry, 7*(1), 60–76. https://doi.org/10.5498/wjp.v7.i1.60

Olweus, D. (1993). *Bullying at school: What we know and what we can do*. Blackwell.

Paluck, E. L., Shepherd, H., & Aronow, P. M. (2016). Changing climates of conflict: A social network experiment in 56 schools. *Proceedings of the National Academy of Sciences, 113*(3), 566–571. https://doi.org/10.1073/pnas.1514483113

Pettigrew, T. F., & Tropp, L. R. (2006). A meta-analytic test of intergroup contact theory. *Journal of Personality and Social Psychology, 90*(5), 751–783. https://doi.org/10.1037/0022-3514.90.5.751

Salmivalli, C. (2010). Bullying and the peer group: A review. *Aggression and Violent Behavior, 15*(2), 112–120. https://doi.org/10.1016/j.avb.2009.08.007

Swearer, S. M., & Hymel, S. (2015). Understanding the psychology of bullying: Moving toward a social-ecological diathesis–stress model. *American Psychologist, 70*(4), 344–353. https://doi.org/10.1037/a0038929

Thornberg, R. (2015). School bullying as a collective action: Stigma processes and identity struggles. *Children & Society, 29*(4), 310–320. https://doi.org/10.1111/chso.12058

Tilaar, H. A. R. (2004). *Multikulturalisme: Tantangan-tantangan global masa depan dalam transformasi pendidikan nasional*. Grasindo.

Ttofi, M. M., & Farrington, D. P. (2011). Effectiveness of school-based programs to reduce bullying: A systematic and meta-analytic review. *Journal of Experimental Criminology, 7*(1), 27–56. https://doi.org/10.1007/s11292-010-9109-1

UNESCO. (2019). *Behind the numbers: Ending school violence and bullying*. UNESCO.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Wahidah, A., Hamidsyukrie, Z. M., Syafruddin, Ilyas, M., Malik, I., & Amalia, S. M. (2024). Penerapan nilai-nilai multikultural guna mencegah praktek bullying pada siswa di SMA Mataram. *Jurnal Abdi Insani, 11*(1), 474–482. https://doi.org/10.29303/abdiinsani.v11i1.1367

Zed, M. (2004). *Metode penelitian kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.